

Depolitisasi Film Sejarah Peristiwa 1965

PALING tidak generasi yang lahir tahun 1980-an tentu masih lekat ingatannya dengan Film *Pengkhianatan G30S/PKI*. Film karya Arifin C. Noer ini selalu diputar setiap malam menjelang 1 Oktober ketika Orde Baru masih berkuasa. Film ini mengekspose berbagai penyalakan yang dilakukan terhadap para jenderal korban Gerakan 30 September. Setelah Orde Baru tumbang, adegan penyalakan dalam film ini diragukan kebenarannya. Nyatanya hasil *visum et repertum* dokter yang memeriksa jenazah para jenderal setelah dikeluarkan dari sumbu tua tidak menyebutkan adanya penyalakan keji.

Film ini menjadi salah satu produk budaya yang menjustifikasi kekerasan terkait dengan penumpasan Gerakan 30 September yang terjadi dalam kurun waktu 1965 sampai awal 1970-an. Hal penting lainnya yang ditekankan bahwa film ini bukanlah karya fiksi, namun diproduksi sebagai sebuah dokumenter sejarah. Film ini mengklaim bahwa seluruh adegan didasari oleh informasi sejarah mengenai Peristiwa 1965 versi Nugroho Notosusanto, pujangga sejarah Orde Baru. Tak hanya melalui film, kisah serupa juga ditampilkan dalam bentuk novel yang ditulis oleh Arswendo Atmowiloto.



HENDRA KURNIAWAN
DOSEN PENDIDIKAN SEJARAH
PEGIAT PUSAT KAJIAN DEMOKRASI DAN HAM (PUSDEMA)
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

Baik film maupun novel *Pengkhianatan G30S/PKI* sukses menyuguhkan upaya legitimasi politik Orde Baru. Sekaligus menjadi "monumen" politik ingatan bagi masyarakat. Sejak dirilis pada tahun 1984 hingga setahun sebelum jatuhnya Presiden Suharto, film *Pengkhianatan G30S/PKI* ditayangkan setiap tahunnya di stasun-stasiun televisi nasional sebagai ritual sekaligus propaganda rutin untuk membangun persepsi masyarakat. Melalui pendekatan kebudayaan dan politik, pemerintah saat itu mengupayakan menjaga stabilitas kekuasaannya.

Pada tahun 1998, seiring dengan runtuhnya Orde Baru, film *Pengkhianatan G30S/PKI* dihentikan pemutarnya pada seluruh saluran televisi. Ini merupakan langkah awal yang baik untuk mendukung upaya dekonstruksi atas interpretasi tunggal sejarah. Saat Orde Baru masih berjaya pun sebenarnya banyak akademisi dan aktivis yang secara sembunyi-sembunyi meyakini bahwa sejarah Peristiwa 1965 versi Orde Baru tidak dapat menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Sejarah telah dipolitisasi. Maka benar yang diungkapkan oleh SK Kochhar (2008) bahwa sejarah adalah akar dan politik adalah buahnya.

Antara fakta dan kreativitas

Film bertemakan sejarah memiliki peran penting sebagai sarana

pendidikan sejarah dan penanaman nilai pada masyarakat, utamanya generasi muda. Sayangnya produksi film bertema sejarah pada masa Orde Baru menyimpan tujuan lain yang lebih utama, yakni strategi politik pengendalian sejarah. Penanaman nilai dan kesadaran sejarah yang dikehendaki oleh Orde Baru lebih fokus pada upaya membentuk militansi generasi muda terhadap penguasa yang menjadi pahlawan. Bahkan lebih dari itu dianggap sebagai satu-satunya yang mampu memberi kebahagiaan seutuhnya pada rakyat.

Memasuki masa Reformasi muncul euforia kebebasan berpendapat. Berbagai elemen kritis dalam masyarakat mulai bermesuk budi demi menegakkan kebenaran ilmiah dalam sejarah dan menanggalkan kepentingan politik yang menyelimutinya. Di sisi lain, saat ini semangat dan peluang untuk mengenalkan sejarah bangsa pada generasi muda juga kembali menguat. Film-film bertema sejarah yang digarap secara lebih konstruktif dan kreatif bermunculan dan mampu menarik minat.

Harus diakui bahwa produksi film bergenre sejarah memang perlu mengupayakan cara-cara yang lebih kreatif. Akhir-akhir ini tampak mulai ada *geget* untuk mewujudkan hal tersebut. Maka sejarah akhirnya tidak hanya menjadi sarana edukatif namun juga rekreatif. Untuk itu memberi bumbu dalam sebuah kisah sejarah yang difilmkan sebenarnya sah sepanjang tidak mengaburkan fakta dan makna dari sua-

tu peristiwa sejarah. Tentu bumbu itu tidak boleh bertendensi politis, namun sungguh sebagai bagian dari ide kreatif untuk memberi penguatan dan menarik minat penonton.

Tidak dimungkiri bahwa dalam sebuah karya film sejarah, unsur estetika untuk menampilkan sisi romantika sangat diperlukan. Akan tetapi jangan sampai terjadi kekeliruan dalam menginterpretasi sejarah. Hal ini berbahaya karena dapat menimbulkan pemahaman sejarah yang menyimpang. Untuk itu sutradara dan penulis naskah sebaiknya jeli dalam memilih sumber sejarah yang akan jadi referensi saat memproduksi suatu film bertema sejarah. Jauh lebih baik jika dapat menghadirkan sejarawan maupun narasumber terpercaya sebagai konsultan yang membantu mengkritisi adegan demi adegan agar tidak melenceng dari fakta sejarah yang sebenarnya.

Maka pada era sekarang ini kiranya pantas untuk menghadirkan sebuah film sejarah yang dapat memaknai kembali Peristiwa 1965 dengan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan jauh dari muatan politis. Sejarah merupakan pendidikan bagi generasi muda yang mesti disampaikan secara objektif dan jujur. Sejarah harus kembali pada *khittah*-nya, bukan sebagai alat politik, melainkan sarana meng-Indonesia yang sejati dengan menanamkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan juga humanisme. (*)